



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini merupakan amanat dari UU No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja dari Biro Persidangan II selama satu tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja ini secara ringkas berisi gambaran umum, perencanaan dan perjanjian kinerja, dan akuntabilitas kinerja dari Biro Persidangan II selama tahun 2020. Di samping itu, dengan disusunnya Laporan Kinerja ini juga diharapkan akan menjadi acuan unit-unit kerja di lingkungan Biro Persidangan II dalam membuat Laporan Kinerja tahun berikutnya. Selain itu, adalah untuk bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja ke depannya.

Akhirnya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan pemikiran bagi terwujudnya Laporan Kinerja ini, khususnya unit-unit kerja di Biro Persidangan II. Semoga apa yang telah kita hasilkan bersama dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam memberikan dukungan kepada DPR RI, baik secara teknis maupun administratif dalam mendukung persidangan dan rapat-rapat Alat Kelengkapan DPR RI. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami membuka diri terhadap berbagai



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020**  
**BIRO PERSIDANGAN II**

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

masukan, baik kritik, saran maupun pandangan konstruktif yang ditujukan untuk kesempurnaan Laporan Kinerja ini, khususnya untuk pembuatan Laporan Kinerja selanjutnya karena Laporan Kinerja ini akan terus mengikuti perkembangan dinamika sesuai dengan perubahan yang terjadi terhadap lembaga legislatif kita.

Jakarta, Januari 2021  
P It. Kepala Biro Persidangan II,

ttd

Dra. Nurul Faiziah  
NIP. 196502201991032002



## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. UMUM .....	1
B. DASAR HUKUM.....	3
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
E. SUMBER DAYA MANUSIA BIRO PERSIDANGAN II.....	10
F. PERAN STRATEGIS.....	12
G. POTENSI DAN TANTANGAN .....	14
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
A. PERJANJIAN KINERJA.....	15
B. ALOKASI ANGGARAN.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>18</b>
A. ANALIS CAPAIAN KINERJA.....	18
B. REALISASI ANGGARAN.....	22
<b>BAB IV CAPAIAN OUTPUT</b> .....	<b>24</b>
A. BAGIAN SEKRETARIAT BADAN LEGISLASI .....	24
B. BAGIAN SEKRETARIAT BADAN ANGGARAN .....	27
C. BAGIAN SEKRETARIAT MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN .....	30
D. BAGIAN SEKRETARIAT BADAN URUSAN RUMAH TANGGA .....	32
E. BAGIAN SEKRETARIAT PANITIA KHUSUS .....	36



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020**  
**BIRO PERSIDANGAN II**

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

F. BAGIAN SEKRETARIAT AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	43
<b>LAMPIRAN</b> .....	45
<b>FOTO DOKUMENTASI</b> .....	46



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Biro Persidangan II .....	8
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2020.....	15
Tabel 3	Rentang Nilai Mutu Pelayanan.....	16
Tabel 4	Anggaran Biro Persidangan II Satker Setjen Tahun Anggaran 2020 ...	17
Tabel 5	Capaian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2020 .....	19
Tabel 6	Rekapitulasi Rapat Badan, Mahkamah, dan Pansus.....	20
Tabel 7	Realisasi Anggaran Biro Persidangan II TA 2020.....	22
Tabel 8	Rekapitulasi Rapat Baleg .....	25
Tabel 9	Rekapitulasi Output Sekretariat Baleg Tahun 2020.....	25
Tabel 10	Rekapitulasi Dokumen Materi Persidangan Baleg .....	26
Tabel 11	Rekapitulasi Rapat/Audiensi Badan Anggaran .....	28
Tabel 12	Rekapitulasi Dukungan Persidangan Banggar .....	29
Tabel 13	Rekapitulasi Rapat dan Sidangan MKD .....	30
Tabel 14	Perbandingan Capaian Bagian Sekretariat MKD .....	31
Tabel 15	Rekapitulasi Rapat BURT .....	32
Tabel 16	Rekapitulasi Dokumen Materi Persidangan BURT	34
Tabel 17	Perbandingan Capaian Kinerja Bagian Sekretariat BURT .....	34
Tabel 18	Rekapitulasi Rapat Pansus.....	36
Tabel 19	Perbandingan Capaian Kinerja Bagian Sekretariat Pansus.....	36



Tabel 20 Rekapitulasi Output Rapat BAKN.....	37
Tabel 21 Perbandingan Capaian Kinerja Bagian Sekretariat BAKN.....	40
Tabel 22 Capaian Kinerja Biro Persidangan II .....	41



## BAB I PENDAHULUAN

### A. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Biro Persidangan II berkedudukan sebagai salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Persidangan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan persidangan kepada Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Panitia Khusus (Pansus) serta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Persidangan II telah berupaya melaksanakan tata kelola secara profesional dan akuntabel sesuai dengan mekanisme berdasarkan prinsip *good governance* yang salah satunya adalah akuntabilitas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang salah satu asasnya adalah asas akuntabilitas. Maksud dari asas tersebut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sementara bentuk dari akuntabilitas tersebut adalah terwujudnya laporan kinerja yang disusun setiap tahun, yang memuat capaian kinerja selama satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan



dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Adapun penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan II mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7/PER-SEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI; serta amanat Reformasi Birokrasi, khususnya area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja Biro Persidangan II yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai feedback untuk perbaikan kinerja ke depan dan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Persidangan II yang telah dilakukan kepada Pimpinan Setjen DPR RI, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja Biro Persidangan II ini merupakan laporan kinerja dengan indikator persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh Baleg, Banggar, BURT, MKD, Pansus, dan BAKN, berupa dukungan teknis dan administrasi persidangan yang disiapkan oleh sekretariat Alat Kelengkapan DPR RI di lingkungan Biro Persidangan II, yang meliputi dokumen yang dibuat dan disiapkan serta diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan rapat-rapat terkait dengan tugas alat kelengkapan DPR RI. Kegiatan rapat-rapat tersebut terbagi dalam lima masa persidangan sebagai berikut:

1. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019–2020, dengan jadwal Masa Sidang dimulai tanggal 13 Januari 2020 s.d. 27 Februari 2020 dan Masa Reses dimulai tanggal 28 Februari 2020 s.d. 29 Maret 2020;
2. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019–2020, dengan jadwal Masa Sidang dimulai tanggal 30 Maret 2020 s.d. 20 Mei 2020 dan Masa Reses dimulai tanggal 21 Mei 2020 s.d. 14 Juni 2020;





3. Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019–2020, dengan jadwal Masa Sidang dimulai tanggal 15 Juni 2020 s.d. 16 Juli 2020 dan Masa Reses dimulai tanggal 17 Juli 2020 s.d. 13 Agustus 2020;
4. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020–2021, dengan jadwal Masa Sidang dimulai tanggal 14 Agustus 2020 s.d. 9 Oktober 2020 dan Masa Reses dimulai tanggal 10 Oktober 2020 s.d. 1 November 2020;
5. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020–2021, dengan jadwal Masa Sidang dimulai tanggal 9 November 2020 s.d. 11 Desember 2020 dan Masa Reses dimulai tanggal 12 Desember 2020 s.d. 10 Januari 2020.

## B. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disusun dengan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan sekretajus jenderal dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat republik indonesia
8. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang



Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR membentuk Alat Kelengkapan DPR (AKD) yang terdiri dari:

1. Pimpinan DPR;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Legislasi;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
7. Badan Kerja Sama Antar Parlemen;
8. Mahkamah Kehormatan Dewan;
9. Badan Urusan Rumah Tangga;
10. Panitia Khusus, dan
11. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Setiap alat kelengkapan DPR RI tersebut didukung oleh Bagian Sekretariat Alat Kelengkapan DPR RI. Adapun bagian sekretariat alat kelengkapan DPR RI yang termasuk dalam jajaran Biro Persidangan II adalah Bagian Sekretariat Badan Legislasi (Baleg), Bagian Sekretariat Badan Anggaran (Banggar), Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Bagian Sekretariat Panitia Khusus (Pansus), dan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



menyebutkan bahwa Biro Persidangan II berkedudukan sebagai salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Persidangan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan persidangan kepada Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Panitia Khusus (Pansus) serta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, baik dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Persidangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Persidangan II;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Persidangan II;
- c. Perumusan dan evaluasi program rencana kegiatan dan anggaran Biro Persidangan II;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Persidangan II;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan persidangan di Biro Persidangan II;
- g. Pelaksanaan rapat di Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Mahkamah Kehormatan Dewan, Panitia Khusus, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI;
- h. Pelaksanaan administrasi persidangan di Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Mahkamah Kehormatan Dewan, Panitia Khusus, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI;
- i. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;
- j. Penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan II; dan
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2018 tentang dapun struktur organisasi Biro Persidangan II secara keseluruhan terdiri atas:



1. Kepala Biro Persidangan II
2. Kepala Bagian Sekretariat Legislasi, terdiri atas:
  - a. Kepala Sub Bagian Rapat
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran, terdiri atas:
  - a. Kepala Sub Bagian Rapat
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Kepala Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga, terdiri atas:
  - a. Kepala Sub Bagian Rapat
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5. Kepala Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, terdiri atas:
  - a. Kepala Sub Bagian Rapat
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kepala Sub Bagian Administrasi Perkara
6. Kepala Bagian Sekretariat Panitia Khusus, terdiri atas:
  - a. Kepala Sub Bagian Rapat
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7. Kepala Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, terdiri atas:
  - a. Kepala Sub Bagian Rapat
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

berdasarkan struktur sebagaimana terlihat dalam Bagan berikut :





Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Biro Persidangan II didukung oleh enam unit kerja/bagian, yaitu Bagian Sekretariat Badan Legislasi (Baleg); Bagian Sekretariat Badan Anggaran (Banggar); Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD); Bagian Sekretariat Panitia Khusus (Pansus), dan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Sementara, tugas dan fungsi dari tiap-tiap bagian tersebut sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Biro Persidangan II**

No.	Unit Kerja	Tugas	Fungsi
1	Bagian Sekretariat Baleg	Melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Baleg	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagset Baleg;</li><li>- Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;</li><li>- Pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;</li><li>- Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat Baleg;</li><li>- Pelaksanaan dukungan tata usaha Baleg;</li><li>- Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan II;</li><li>- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.</li></ul>
2	Bagian Sekretariat Banggar	Melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Banggar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagset Banggar;</li><li>- Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; Pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;</li><li>- Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat Banggar;</li><li>- Pelaksanaan dukungan tata usaha Banggar;</li><li>- Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan II;</li><li>- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.</li></ul>
3	Bagian Sekretariat BURT	Melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha BURT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagset BURT;</li><li>- Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;</li><li>- Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat BURT;</li><li>- Pelaksanaan dukungan tata usaha BURT;</li><li>- Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan II;</li><li>- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.</li></ul>
4	Bagian Sekretariat MKD	Melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha MKD	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagset MKD;</li><li>- Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;</li><li>- Pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;</li><li>- Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat MKD;</li><li>- Pelaksanaan dukungan tata usaha MKD;</li><li>- Pelaksanaan dukungan administrasi dan penyiapan bahan verifikasi dan bahan penyelidikan perkara di MKD;</li><li>- Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan II;</li><li>- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.</li></ul>
5	Bagian Sekretariat Pansus	Melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Pansus	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran</li><li>- Bagset Pansus;</li><li>- Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;</li><li>- Pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;</li><li>- Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat Pansus;</li><li>- Pelaksanaan dukungan tata usaha Pansus;</li><li>- Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan II;</li><li>- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.</li></ul>



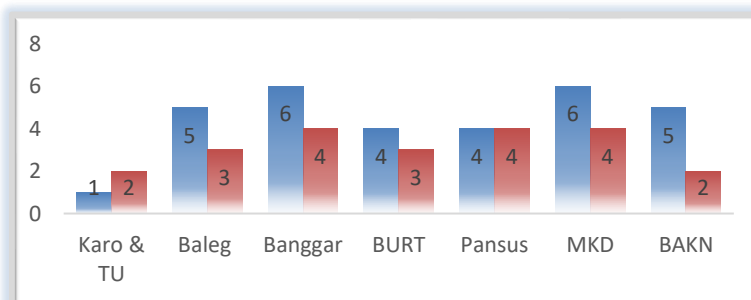
6	Bagian Sekretariat BAKN	Melaksanakan dukungan rapat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagset BAKN;</li><li>- Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;</li><li>- Pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;</li><li>- Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat BAKN;</li><li>- Pelaksanaan dukungan tata usaha BAKN;</li><li>- Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan II;</li><li>- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.</li></ul>
---	-------------------------	-----------------------------	---

Sumber: Diolah dari Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

### E. SUMBER DAYA MANUSIA DI BIRO PERSIDANGAN II

Biro Persidangan II mempunyai SDM, baik SDM struktural maupun SDM fungsional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana program dan anggaran, dukungan pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta layanan perjalanan dinas yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal, SDM di lingkungan Biro Persidangan II sampai dengan akhir 2020 adalah sebanyak 52 orang pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari pejabat struktural 19 orang dan pejabat fungsional umum/pelaksana 33 orang, yaitu Kepala Biro Persidangan II, Bagian Sekretariat Badan Legislasi terdiri dari 8 orang pegawai, Bagian Sekretariat Badan Anggaran terdiri dari 10 orang pegawai, Bagian Bagian Sekretariat BURT terdiri dari 7 Pegawai, Bagian Sekretariat Panitia Khusus terdiri dari 8 orang pegawai, Bagian Sekretariat MKD terdiri dari 10 orang pegawai dan Bagian Sekretariat BAKN terdiri dari 7 orang pegawai, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut.

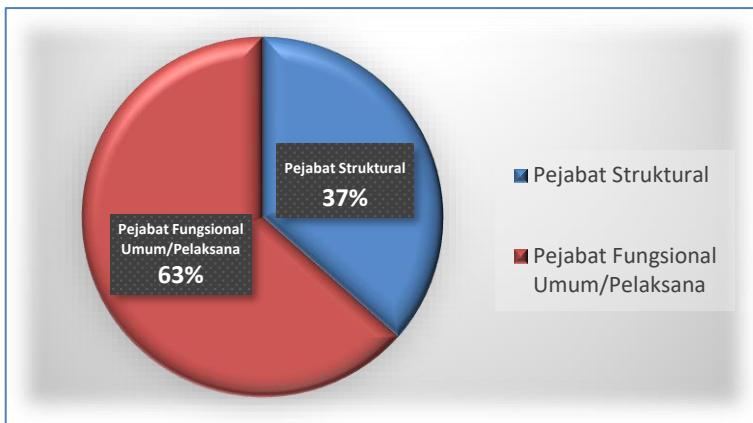
Grafik 1. Komposisi Pegawai Biro Persidangan II





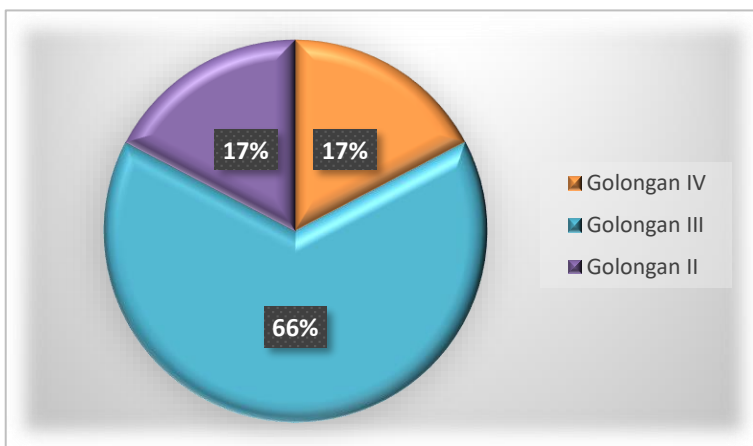
Sumber: Data Kepegawaian 2020

**Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan**



Sumber: Data Kepegawaian 2020

**Grafik 3. Komposisi SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan**



Sumber: Data Kepegawaian 2020





## F. PERAN STRATEGIS

Sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya, Biro Persidangan II memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan dukungan persidangan kepada Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Panitia Khusus serta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang meliputi:

### 1. Kegiatan DPR RI

- a. Pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi Prolegnas; pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU; pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan RUU; pemantauan, peninjauan, dan penyebarluasan UU; dan melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR oleh Badan Legislasi;
- b. Pelaksanaan penentuan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran dan pembahasan APBN di Badan Anggaran;
- c. Pelaksanaan penetapan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR RI dan pembahasan anggaran DPR RI di Badan Urusan Rumah Tangga;
- d. Pelaksanaan Sidang terhadap Kasus-kasus Pelanggaran Kode Etik terhadap Anggota DPR RI di Mahkamah Kehormatan Dewan; dan
- e. Pelaksanaan Pembahasan RUU dan Non RUU (pengawasan kasus-kasus spesifik di Panitia Khusus).
- f. Pelaksanaan pembahasan telaahan terhadap temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

### 2. Kegiatan Sekretariat

- a. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan persidangan di Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Panitia Khusus serta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN);
- b. Pelaksanaan penyiapan dukungan rapat dan tata usaha Sekretariat di bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;
- c. Pelaksanaan penyiapan dukungan rapat dan tata usaha di Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Mahkamah Kehormatan



Dewan dan Panitia Khusus serta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Kegiatan strategis Biro Persidangan II tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung dua program, yaitu program pelaksanaan fungsi DPR RI (fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan) dan program penguatan kelembagaan DPR RI. Pelaksanaan Fungsi Legislasi dilaksanakan oleh Baleg dan Pansus; pelaksanaan Fungsi Anggaran dilaksanakan oleh Banggar; dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dilaksanakan oleh BAKN dan Pansus Non-RUU; serta pelaksanaan Penguatan Kelembagaan DPR RI dilaksanakan oleh BURT dan MKD.

## G. POTENSI DAN TANTANGAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Persidangan II memiliki potensi dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti. Potensi Biro Persidangan II adalah mengembangkan sistem informasi penyusunan undang-undang agar dapat di akses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti sistem legislasi dengan menerapkan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama, *e-office*, dan pengelolaan keterbukaan informasi publik. Dalam upayanya untuk memanfaatkan potensi, Biro Persidangan II memaksimalkan peluang yang dimiliki yaitu memanfaatkan teknologi dan SDM yang dimiliki Biro Persidangan II secara tepatguna.

Selain itu, permasalahan strategis yang juga penting, yaitu adanya dinamika politik DPR RI yang berimplikasi pada pembahasan kebijakan terkait dengan program/kegiatan Setjen DPR RI, khususnya Biro Persidangan II, sehingga hal ini akan berdampak terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya



## BAB II

### PERJANJIAN KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53/2014, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah ditetapkan sebagai komitmen Kepala Biro Persidangan II untuk menjalankan tugas dari Deputi Bidang Persidangan dalam rangka melaksanakan sasaran program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2020, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2020<sup>1</sup>**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus	1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI	100%
	2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3,30
	3. Persentasi Penyerapan Anggaran Biro Persidangan II	90%

Metode Penghitungan:

1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan oleh DPR RI

Penghitungan kinerja “Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan oleh DPR RI” berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus.

<sup>1</sup> Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2020



Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat skenario dan laporan singkat persidangan yang disusun oleh Biro Persidangan II disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan. Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja yang dihasilkan sebesar 20%.

## 2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap Permen Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

**Tabel 3. Rentang Nilai Mutu Pelayanan**

NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	NILAI INDEKS	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 – 64,99	1,00 – 2,5996	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	2,60 – 3,064	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	3,0644 – 3,532	B	Baik
88,31 – 100,00	3,5324 – 4,000	A	Sangat Baik

## 3. Persentase penyerapan anggaran Biro Persidangan II

Penghitungan kinerja “Persentase penyerapan anggaran Biro Persidangan II” dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran yang terakhir.

## B. ALOKASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Biro Persidangan II dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI Tahun 2020 Satker Dewan dan Satker Setjen. Alokasi anggaran Biro Persidangan II pada tahun 2020 Satker Dewan sebesar Rp.89.721.246.000,- dan Satker Setjen sebesar Rp.1.096.678.000,- Anggaran tersebut dialokasikan sebagai berikut:



**Tabel 4. Anggaran Biro Persidangan II Satker Setjen  
Tahun Anggaran 2020**

No.	Bagian	Pagu
1.	Biro Persidangan II	644.958.000
2.	Bagian Sekretariat Badan Legislasi	12.540.000
3	Bagian Sekretariat Badan Anggaran	34.596.000
4	Bagian Sekretariat MKD	154.435.000
5.	Bagian Sekretariat BURT	241.928.000
6	Bagian Sekretariat Panitia Khusus	177.670.000
7.	Bagian Sekretariat BAKN	89.383.000
	Total	1.096.678.000

Sumber: *DIPA Tahun Anggaran 2020*

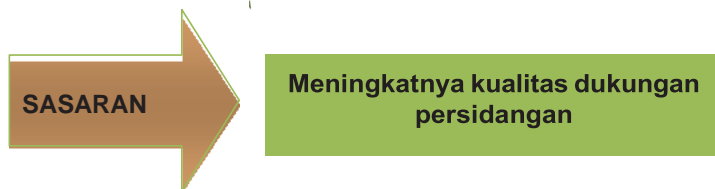


## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. ANALIS CAPAIAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran capaian kinerja tersebut merupakan gambaran pencapaian atas sasaran kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja dan target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Terdapat dua pengukuran capaian kinerja dari Persidangan II, yaitu pengukuran capaian kinerja Satker Dewan dan pengukuran capaian kinerja Satker Setjen.



Sasaran kegiatan dari Biro Persidangan II, yaitu satu sasaran dengan tiga indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat pencapaian satu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran capaian kinerja dari Biro Persidangan II sebagaimana terlihat dalam Tabel 5 berikut:



Tabel 5. Capaian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus	1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3,30	3.305
	3. Persentasi Penyerapan Anggaran Biro Persidangan II	90%	94,43%

Sumber: Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2020.

Dalam menjalankan fungsi koordinasi, Kepala Biro Persidangan II mendistribusikan pelaksanaan indikator kinerja kepada seluruh bagian di lingkungan Biro Persidangan II. Pada tahun 2020 Biro Persidangan II mampu menyelesaikan semua indikator kerjanya dengan baik dan dicapai sesuai target.

Uraian capaian kinerja tiap indikator kinerja akan dijelaskan sebagai berikut:

### Indikator Kinerja 1

#### Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI

**Target**  
100%

**Realisasi**  
100%

**Capaian**  
100%

Penghitungan “Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI” adalah berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat pada Baleg, Banggar, MKD, BURT, Pansus dan BAKN dengan menghitung jumlah realisasi dibagi dengan jumlah target dikalikan dengan 100%. Kegiatan persidangan/rapat pada Baleg, Banggar, MKD, BURT, Pansus dan BAKN berupa dukungan skenario dan laporan singkat persidangan yang dibuat dan disiapkan untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh DPR RI. Dengan adanya skenario Rapat maka rapat dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan materi rapat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan singkat rapat dapat menjadi bahan dan informasi bagi Anggota DPR serta pihak-pihak yang terkait untuk melakukan tindak lanjut hasil keputusan rapat.



Sampai dengan akhir tahun 2020, Baleg, Banggar, MKD, BURT, Pansus dan BAKN telah melaksanakan kegiatan/rapat – rapat dengan dukungan materi berupa skenario dan laporan singkat yang dimanfaatkan DPR RI. Adapun kegiatan/rapat- rapat yang telah dilaksanakan oleh Baleg, Banggar, MKD, BURT, Pansus dan BAKN sebanyak 369 rapat sebagaimana terlihat dalam Tabel 6 berikut.

**Tabel 6. Rekapitulasi Rapat Badan, Mahkamah, dan Pansus**

Bagian Sekretariat	Tahun Sidang 2019 - 2020			Tahun Sidang 2020 - 2021		Total
	MS II	MS III	MS IV	MS I	MS II	
Baleg	30	36	31	48	22	167
Banggar	12	4	17	24	-	57
MKD	4	1	4	2	3	14
BURT	22	10	13	20	12	78
Pansus	-	-	4	-	-	4
BAKN	11	5	9	14	9	49
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>57</b>	<b>78</b>	<b>109</b>	<b>37</b>	<b>369</b>

Sumber: DIPA Tahun Anggaran 2020

Indikator Kinerja 2		
Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan		
Target	Realisasi	Capaian
3,30%	3,305%	100%

Survei dilaksanakan pada bulan September – Nopember 2020. Waktu pelaksanaan survei tersebut untuk menilai kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan selama kurun waktu Januari – Nopember 2020. Responden yang diambil pada survei kinerja ini adalah Anggota DPR RI periode 2019-2024 sebagai pengguna (*user*) layanan Setjen DPR RI. Dari jumlah populasi Anggota DPR RI sebanyak 575 orang, jumlah responden yang diambil sebanyak 231 orang yang melibatkan sembilan Fraksi di DPR RI.

Untuk kualitas dan kecepatan dalam layanan persidangan, rata – rata responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 29,65 persen dan menyatakan puas sebanyak 66,45 persen, sementara responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 3,46 persen, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. Terdapat 0,44 persen yang tidak menyatakan pendapat. Hasil survei mengenai kualitas dan kecepatan dalam



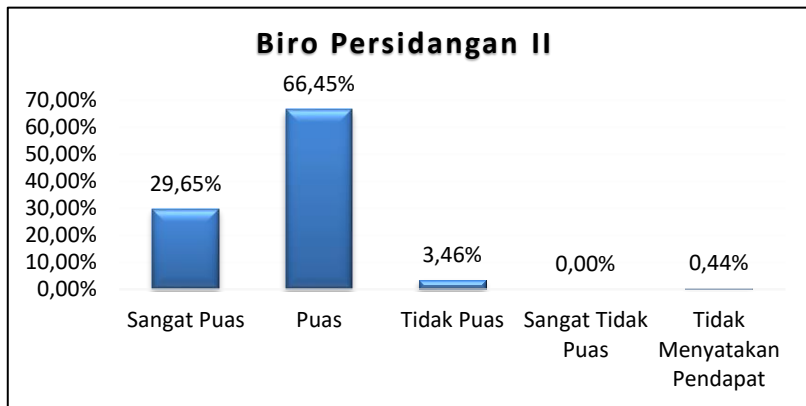


layanan persidangan memperoleh 3,305 atau 82,629 persen dan masuk kategori “Baik” seperti dapat dilihat dalam grafik berikut:

**Grafik Kepuasan Responden**

**kualitas dan**

**kecepatan dalam layanan persidangan**



Sumber laporan hasil survey Setjen DPR RI Tahun 2020

**Indikator Kinerja 3**

**Persentase penyerapan anggaran Biro Persidangan II**

Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Pada tahun 2020, terdapat indikator kinerja baru terkait dengan pengelolaan anggaran, Indikator tersebut adalah Prosentase penyerapan anggaran Biro Persidangan II.

Biro Persidangan II mengelola pagu anggaran sebesar Rp1.096.678.000,- Pada tahun 2020, Biro Persidangan II dapat merealisasikan anggaran sebagai pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Persidangan II sebesar Rp1.035.629.200,- atau 94,43% dari pagu.

Dengan pencapaian tersebut maka indikator kinerja ketiga Biro Persidangan II, yaitu Persentase penyerapan anggaran Biro Persidangan II dengan target sebesar 90% telah tercapai lebih dari 100%.



## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2020, Biro Persidangan II mengelola Anggaran Satker Setjen sebesar **Rp1.096.678.000,-** dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2020, yaitu sebesar **Rp1.035.629.200,-** atau **94,43%**.

Adapun rincian realisasi anggaran Biro Persidangan II Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

**Tabel 7. Realisasi Anggaran Biro Persidangan II TA 2020**

Bagian	Pagu	Realisasi	%
Biro Persidangan II	458.389.000	428.314.600	93,44%
Sekretariat Baleg	56.668.000	50.642.000	89,37%
Sekretariat Banggar	93.671.000	90.835.000	96,97%
Sekretariat BURT	168.837.000	167.985.100	99,50%
Sekretariat MKD	124.606.000	123.547.000	99,15%
Sekretariat Pansus	104.002.000	84.010.000	80,78%
Sekretariat BAKN	90.505.000	90.295.000	99,77%
<b>Total</b>	<b>1.096.678.000</b>	<b>1.035.629.200</b>	<b>94,43%</b>

Sumber: laporan realisasi *Biro Persidangan II Tahun Anggaran 2020*.

Namun demikian, capaian kinerja anggaran diseluruh unit dapat terserap 100%. Hal ini berbanding lurus dengan capaian kerja output di seluruh unit biro Persidangan II yang dapat menyelesaikan seluruh capaian output yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Persentase capaian kinerja total adalah rata-rata capaian seluruh indikator kinerja. Pada tahun 2020, Biro Persidangan II mampu menyelesaikan seluruh target pada tiap indikator kinerja, dan memiliki capaian kinerja 100% (Sangat Baik). Dari sisi anggaran, Biro Persidangan II telah mampu menggunakan anggarannya dengan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran sebesar 94,43% selaras dengan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian penyerapan anggaran yang baik pada tahun 2020.

Dengan demikian, Biro Persidangan II telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta dibarengi dengan realisasi kinerja anggaran yang sesuai dengan pencapaian kinerja.



## BAB IV

### CAPAIAN OUTPUT

Dalam rangka mencapai target 3 (tiga) indikator kinerja Biro Persidangan II, maka Biro Persidangan II melakukan berbagai macam kegiatan, baik di dalam maupun diluar kantor, yang diwujudkan dalam dokumentasi. Dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam rangka mencapai target adalah sebagai berikut:

1. **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Persidangan II** berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 dan anggaran yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut. RKA disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan memperhatikan langkah-langkah strategis yang diperkirakan dapat membuat proses kerja lebih efisien dan efektif.
2. **Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Biro Persidangan II.** LAK merupakan instrumen pertanggungjawaban yang akurat sebagai langkah untuk mengukur capaian Kinerja Biro Persidangan II. LAK menunjukkan hasil kerja yang saling bersinergi dan berintegrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam menjawab tuntutan penyelesaian tugas yang diemban Biro Persidangan II.

Adapun capaian output pada masing-masing bagian di lingkungan Biro Persidangan II sebagai berikut:

#### A. Bagian Sekretariat Badan Legislasi (Baleg)

Sampai dengan akhir tahun 2020, Bagian Sekretariat Baleg telah memberikan dukungan kegiatan kepada Baleg dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU MD3 dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Adapun kegiatan/rapat-rapat yang telah dilaksanakan oleh Baleg sebanyak 167 rapat sebagaimana terlihat dalam Tabel 8 berikut:



Tabel 8. Rekapitulasi Rapat Baleg

No.	Masa Persidangan	BULAN												Jumlah Per Masa Sidang
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS II	12	18											30
2	MS III			3	18	9	6							36
3	MS IV						10	14	7					31
4	MS I								7	32	8	1		48
5	MS II											22		22
Jumlah Per Bulan		12	18	3	18	9	16	14	14	32	8	23	-	167

Sumber: *Bagian Sekretariat Badan Legislasi DPRRI.*

Berdasarkan kegiatan rapat-rapat Baleg tersebut, capaian kinerja Bagian Sekretariat Baleg pada Tahun 2020, yaitu tercapai sebanyak 5 dokumen Materi Persidangan Baleg yang telah dilakukan dalam 5 Masa Persidangan, dengan capaian output yang telah diselesaikan oleh Sekretariat Baleg tahun 2020 dalam Tabel berikut:

Tabel 9. Rekapitulasi Output Sekretariat Baleg pada Tahun 2020

<b>1. Laporan Materi Penyusunan RUU Usul Baleg</b>	<b>3</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila (Selesai Penyusunan di Badan Legislasi tanggal 22 April 2020 dan disetujui menjadi RUU usul DPR pada Paripurna tanggal 12 Mei 2020)</li><li>RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tinggal (Selesai disusun Badan Legislasi tanggal 1 Juli 2020 dan masih menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR)</li><li>RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (masih dalam penyusunan di Baleg)</li></ul>	
<b>2. Laporan Materi Pembahasan RUU Usul Pemerintah</b>	<b>1</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Cipta Kerja) (Selesai pembahasan di Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020 dan disetujui menjadi UU dlm Rapur tanggal 5 Oktober 2020)</li></ul>	
<b>3. Laporan Materi Prolegnas</b>	<b>3</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 (selsai disusun Baleg tanggal 16 Januari 2020 dan disahkan dalam Rapur tanggal 22 Januari 2020)</li><li>Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 (selesai dievaluasi di Baleg tanggal 2 Juli 2020)</li><li>Perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024 dan penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021</li></ul>	
<b>4. Laporan Materi Harmonisasi RUU</b>	<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selesai harmonisasi tanggal 8 Mei</li></ul>	



2020 dan disetujui menjadi RUU usul DPR pada Paripurna tanggal 12 Mei 2020)	
▪ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selesai harmonisasi tanggal 19 Februari 2020 dan disetujui menjadi RUU usul DPR pada Paripurna tanggal 2 April 2020	
▪ RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi) (selesai harmonisasi tanggal 29 Juni 2020 dan disetujui menjadi RUU usul DPR pada Paripurna tanggal 5 Oktober 2020)	
▪ RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (selesai harmonisasi tanggal 4 September 2020 dan menunggu Paripurna persetujuan menjadi RUU usul DPR	
▪ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selesai harmonisasi tanggal 17 September 2020)	
▪ RUU tentang Ketahanan Keluarga (selesai harmonisasi di Baleg tanggal 24 November 2020)	
▪ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (dalam tahap harmonisasi)	
▪ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (selesai harmonisasi di Baleg tanggal 25 November 2020 dan disetujui menjadi RUU usul DPR pada Paripurna tanggal 07 Desember 2020	
▪ RUU tentang Minuman Beralkohol (dalam tahap harmonisasi)	
▪ RUU tentang Pendidikan Kedokteran (selesai harmonisasi di Baleg tanggal 11 Mei 2020)	
<b>5. Laporan Materi Penyusunan Peraturan DPR</b>	<b>2</b>
▪ Peraturan DPR tentang Tata Tertib (selesai penyusunan di Baleg tanggal 31 Maret 2020 dan disetujui dalam Rapur tanggal 6 April 2020)	
▪ Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Undang-Undang selesai penyusunan di Baleg tanggal 30 Maret 2020 dan disetujui dalam Rapur tanggal 2 April 2020	

Sumber Bagian Sekretariat Badan Legislasi DPR RI

**Tabel 10. Rekapitulasi Dokumen Materi Persidangan Baleg**

Kegiatan	Jumlah Rapat	Target (dok.)	Realisasi (dok.)	Capaian	
				Kuantitatif	Kualitatif
1) MP II	30	1	1	100%	100%
2) MP III	36	1	1	100%	100%
3) MP IV	31	1	1	100%	100%
4) MPI	48	1	1	100%	100%
5) MP II	22	1	1	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>167</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Bagian Sekretariat Badan Legislasi DPR RI.



Berdasarkan Tabel 10 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Bagian Sekretariat Baleg telah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian kinerja Bagian Sekretariat Baleg telah mencapai target, yaitu mencapai 5 dokumen dari 5 dokumen yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja sehingga capaian kerjanya tercapai 100%, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif

## B. Bagian Sekretariat Badan Anggaran (Banggar)

Kegiatan persidangan rapat Banggar berupa dukungan teknis dan administrasi serta substansi persidangan dan pelaksanaan tugas Badan Anggaran yang disiapkan oleh Bagian Sekretariat Banggar, meliputi:

- 1) Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 dan RKP Tahun Anggaran 2021;
- 2) Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2020;
- 3) Pembahasan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019;
- 4) Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2020;
- 5) Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021; dan Pelaksanaan Kegiatan Badan Anggaran di Tahun 2020.

Jumlah materi tersebut merupakan dokumen yang dibuat dan disiapkan oleh Bagian Sekretariat Banggar serta diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan rapat-rapat dan pelaksanaan tugas Badan Anggaran DPR RI. Adapun materi persidangan yang dibuat dan disiapkan oleh Bagian Sekretariat Banggar adalah berupa kelengkapan penyelenggaraan rapat dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut setelah rapat, yaitu:

- **Persiapan rapat**, meliputi: jadwal acara rapat, surat undangan rapat, daftar hadir peserta rapat, skenario rapat, dan bahan rapat;
- **Pelaksanaan rapat**, meliputi: layanan bahan rapat dan jamuan rapat;
- **Tindak lanjut** setelah rapat, meliputi: rekapitulasi daftar hadir anggota rapat, draf laporan singkat, draf catatan rapat, dan draf kesimpulan rapat, serta konsep surat yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil rapat.



Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Badan Anggaran lainnya, antara lain kunjungan kerja ke dalam negeri, diperlukan dukungan pengurusan dan persiapan administrasi perjalanan, administrasi surat masuk dan keluar, serta dukungan teknis, administrasi dan substansi selama kunjungan dan pertemuan/rapat yang dilakukan dalam kunjungan. Setelah kunjungan kerja selesai diperlukan pembuatan konsep laporan hasil kunjungan kerja. Bagian Sekretariat Badan Anggaran juga melakukan kegiatan administrasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang mendukung seluruh kegiatan di Badan Anggaran, Revisi Anggaran, membuat penjilidan buku proses pembahasan APBN, dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Bagian Sekretariat Banggar telah memberikan dukungan kegiatan kepada Banggar dalam melaksanakan tugasnya dan sesuai dengan siklus pembahasan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) di tahun 2020.

Adapun kegiatan/rapat-rapat yang telah dilaksanakan oleh Banggar sebanyak 57 rapat sebagaimana terlihat dalam Tabel 11 berikut:

**Tabel 11. Rekapitulasi Rapat/Audiensi Banggar**

No.	Masa Persidangan	BULAN												Jumlah Per Masa Sidang
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS II	5	7											12
2	MS III			1		4								4
3	MS IV						7	10						17
4	MS I								4	18		1	1	24
5	MS II													
Jumlah Per Bulan		5	7	1	-	4	7	10	4	18	-	1	1	57

Sumber: Bagian Sekretariat Badan Anggaran DPRRI.

Berdasarkan kegiatan rapat-rapat Banggar tersebut, capaian kinerja Bagian Sekretariat Banggar pada Tahun 2020, yaitu tercapai sebanyak 6 dokumen Materi Persidangan Banggar melalui kegiatan rapat-rapat yang telah dilaksanakan sebanyak 57 rapat, dengan rincian dokumen sebagaimana terlihat dalam Tabel 12 berikut.

**Tabel 12. Rekapitulasi Dukungan Persidangan Banggar**

Kegiatan	Jumlah Rapat	Target (dok.)	Realisasi (dok.)	Capaian	
				Kuantitatif	Kualitatif
<b>Kegiatan yang telah dilaksanakan:</b>					
1) Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan RKP 2021	14	1	1	100%	100%
2) Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2020	2	1	1	100%	100%
3) Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN TA 2020	3	1	1	100%	100%
4) RUU tentang Pertanggungjawaban	5	1	1	100%	100%
5) RUU tentang APBN 2021	15	1	1	100%	100%
6) Pelaksanaan Kegiatan Banggar, meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kunjungan Kerja DN ke Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.</li><li>• Audiensi dengan DPRD.</li><li>• Rapat Koordinasi.</li></ul>	19	1	1	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Bagian Sekretariat Badan Anggaran DPRRI.*

Perbandingan capaian kinerja Bagian Sekretariat Banggar Tahun 2020 dengan tahun 2019 sebagaimana terlihat pada table 13 sebagai berikut :

**Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Bagian Sekretariat Banggar**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	
			Kuantitatif	kualitatif
2019	6 dokumen (penyesuaian target menjadi 5 dokumen)	5 dokumen	100%	100%
2020	6 dokumen	6 dokumen	100%	100%

Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Bagian Sekretariat Banggar pada Tahun 2020, yaitu tercapai 100% atau 6 dokumen Persidangan Banggar antara lain melalui dukungan kegiatan rapat-rapat/audiensi yang telah dilaksanakan sebanyak 57 kegiatan, dan kunjungan kerja ke 2 (dua) daerah. Dengan demikian indikator kinerja "Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh Sekretariat Banggar sesuai peraturan" dengan target 100% sehingga nilai capaian kerjanya adalah 100%.





### C. Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Sampai dengan akhir tahun 2020, Bagian Sekretariat MDK telah memberikan dukungan kegiatan kepada MKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan UU MD3 dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Adapun kegiatan/rapat- Rapat yang telah dilaksanakan oleh MKD sebanyak 14 rapat sebagaimana terlihat dalam Tabel 13 berikut:

**Tabel 13. Rekapitulasi Rapat dan Sidang MKD**

No.	Masa Persidangan	BULAN												Jumlah Per Masa Sidang
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS II	3	1											4
2	MS III				1									1
3	MS IV					3	1							4
4	MS I							2						2
5	MS II										3			3
Jumlah Per Bulan		3	1	-	-	-	3	1	2	-	-	3	-	14

Sumber: Bagian Sekretariat MKD DPRRI.

Berdasarkan kegiatan rapat dan sidang MKD tersebut, capaian output Bagian Sekretariat MKD pada Tahun 2020, yaitu tercapai sebanyak 5 (lima) dokumen materi/bahan rapat Masa Persidangan II – IV Tahun 2019 – 2020 dan Masa Persidangan I – II Tahun 2020 – 2021 yang dimanfaatkan oleh DPR RI yang telah dilakukan dalam 5 (lima) Masa Persidangan; dan 5 (lima) dokumen tata usaha Masa Persidangan II – IV Tahun 2019 – 2020 dan Masa Persidangan I – II Tahun 2020 – 2021.

Dokumen skenario dan laporan singkat persidangan Bagian Sekretariat MKD yang dimanfaatkan DPR RI terdiri dari:

**a. Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020 (1 Dokumen).**

Pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020, Bagian Sekretariat MKD telah menyusun skenario dan laporan singkat rapat dan sidang, sebagai berikut:

1. Skenario dan laporan singkat Rapat Intern MKD sebanyak 3 berkas;
2. Skenario dan laporan singkat sidang MKD sebanyak 1 berkas;

**b. Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 (1 Dokumen).**

Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020, Sekretariat MKD telah menyusun skenario dan laporan singkat Rapat Intern MKD sebanyak 1 berkas;

**c. Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 (1 Dokumen).**



Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020, Sekretariat MKD telah menyusun skenario dan laporan singkat Rapat Intern MKD sebanyak 4 berkas;

**d. Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 (1 Dokumen).**

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2020, Sekretariat MKD telah menyusun skenario dan laporan singkat Rapat Intern MKD sebanyak 2 berkas;

**e. Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021 (1 Dokumen).**

Pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021, Sekretariat MKD telah menyusun skenario dan laporan singkat rapat dan sidang, sebagai berikut:

1. Skenario dan laporan singkat Rapat Intern MKD sebanyak 2 berkas;
2. Skenario dan laporan singkat sidang MKD sebanyak 1 berkas.

Persandingan capaian output Bagian Sekretariat MKD DPR RI Tahun 2020 dengan Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel 14 berikut:

**Tabel 14. Perbandingan Capaian Bagian Sekretariat MKD**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	
			Kuantitatif	Kualitatif
2019	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%
2020	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%

Sumber: Bagian Sekretariat MKD DPR RI.

Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja dari Bagian Sekretariat MKD, baik pada Tahun 2019 maupun sampai dengan Tahun 2020 secara kuantitatif dan kualitatif tetap tercapai 100% karena prosentase dokumen materi/bahan rapat Masa Persidangan II – IV Tahun 2019 – 2020 dan Masa Persidangan I – II Tahun 2020 – 2021 yang dimanfaatkan oleh DPR RI yang dibuat dan disiapkan oleh Bagian Sekretariat MKD telah seluruhnya digunakan oleh MKD DPR RI. Dengan demikian, indikator kinerja “prosentase dokumen materi/bahan rapat Masa Persidangan II – IV Tahun 2019 – 2020 dan Masa Persidangan I – II Tahun 2020 – 2021 yang dimanfaatkan oleh DPR RI” dengan target 5 (lima) dokumen telah terealisasi 100% sehingga nilai capaian kerjanya adalah 100%.



## D. Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

Sampai dengan akhir tahun 2020, Bagian Sekretariat BURT telah memberikan dukungan kegiatan kepada BURT dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU MD3 dan Tatib. Adapun kegiatan/ rapat-rapat yang telah dilaksanakan oleh BURT sebanyak 78 rapat sebagaimana terlihat dalam Tabel 15 berikut:

**Tabel 15. Rekapitulasi Rapat BURT**

No.	Masa Persidangan	BULAN												Jumlah Per Masa Sidang
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS II	10	12											22
2	MS III			2	5	3								10
3	MS IV						9	4						13
4	MS I								7	11	3			20
5	MS II											10	2	12
Jumlah Per Bulan		10	12	2	5	3	9	4	7	11	3	10	2	78

Sumber: *Bagian Sekretariat BURT DPR RI.*

Dokumen skenario dan laporan singkat persidangan Bagian Sekretariat BURT yang dimanfaatkan DPR RI terdiri dari:

### a. Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020 (1 Dokumen).

Pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020, Sekretariat BURT telah menyusun skenario dan laporan singkat rapat-rapat, sebagai berikut:

1. Skenario dan laporan singkat Rapat Pimpinan BURT sebanyak 1 berkas;
2. Skenario dan laporan Rapat Intern BURT sebanyak 1 berkas;
3. Skenario dan laporan singkat Rapat BURT sebanyak 10 berkas;
4. Skenario dan laporan singkat Rapat Panja sebanyak 10 berkas.

### b. Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 (1 Dokumen).

Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020, Sekretariat BURT telah menyusun skenario dan laporan singkat rapat-rapat, sebagai berikut:

1. Skenario dan laporan singkat Rapat Pimpinan BURT sebanyak 1 berkas;
2. Skenario dan laporan rapat Intern BURT sebanyak 1 berkas;
3. Skenario dan laporan singkat Rapat BURT sebanyak 6 berkas;
4. Skenario dan laporan singkat Rapat Panja sebanyak 2 berkas.



**c. Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 (1 Dokumen).**

Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020, Sekretariat BURT telah menyusun skenario dan laporan singkat rapat-rapat, sebagai berikut:

1. Skenario dan laporan singkat Rapat Pimpinan BURT sebanyak 1 berkas;
2. Skenario dan laporan singkat Rapat Intern BURT sebanyak 1 berkas;
3. Skenario dan laporan singkat Rapat BURT sebanyak 5 berkas;
4. Skenario dan laporan singkat Rapat Panja sebanyak 7 berkas.

**d. Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 (1 Dokumen).**

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2020, Sekretariat BURT telah menyusun skenario dan laporan singkat rapat-rapat, sebagai berikut:

1. Skenario dan laporan singkat Rapat Pimpinan BURT sebanyak 1 berkas;
2. Skenario dan laporan singkat Rapat Intern BURT sebanyak 1 berkas;
3. Skenario dan laporan singkat Rapat BURT sebanyak 7 berkas;
4. Skenario dan laporan singkat Rapat Panja sebanyak 11 berkas.

**e. Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021 (1 Dokumen).**

Pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021, Sekretariat BURT telah menyusun skenario dan laporan singkat rapat-rapat, sebagai berikut:

1. Skenario dan laporan singkat Rapat Pimpinan BURT sebanyak 1 berkas;
2. Skenario dan laporan singkat Rapat Intern BURT sebanyak 1 berkas;
3. Skenario dan laporan singkat Rapat BURT sebanyak 7 berkas;
4. Skenario dan laporan singkat Rapat Panja sebanyak 3 berkas.

Berdasarkan kegiatan rapat-rapat BURT tersebut, capaian kinerja Bagian Sekretariat BURT pada Tahun 2020, yaitu tercapai sebanyak 5 dokumen Persidangan BURT selama 5 kali masa persidangan yang terdiri dari dukungan penyelenggaraan rapat dan administrasi, dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan rincian dokumen sebagaimana Tabel 16 sebagai berikut:



Tabel 17. Rekapitulasi Dokumen Materi Persidangan BURT

Kegiatan	Jumlah Rapat	Target (dok.)	Realisasi (dok.)	Capaian	
				Kuantitatif	Kualitatif
1) MP II	22	1	1	100%	100%
2) MP III	10	1	1	100%	100%
3) MP IV	13	1	1	100%	100%
4) MP I	20	1	1	100%	100%
5) MP II	12	1	1	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Bagian Sekretariat BURT DPR RI.

Perbandingan capaian kinerja Bagian Sekretariat BURT tahun 2020 dengan tahun 2019 sebagaimana terlihat pada table 18 sebagai berikut:

Table 18. Perbandingan Capaian Kinerja Bagian Sekretariat BURT

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	
			Kuantitatif	Kualitatif
2019	5 dokumen	5 dokumen	100%	100%
2020	5 dokumen	5 dokumen	100%	100%

Sumber Bagian Set BURT

Berdasarkan Tabel 18 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Bagian Sekretariat BURT, baik pada tahun 2019 maupun sampai dengan tahun 2020 secara kuantitatif dan kualitatif tetap tercapai 100% karena jumlah dokumen materi persidangan yang dinuat dan disiapkan oleh Bagian Sekretariat BURT telah seluruhnya digunakan oleh BURT DPR RI. Dengan demikian, indikator kinerja "Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh BURT sesuai peraturan" dengan target 100% telah terealisasi 100% sehingga nilai capaian kerjanya adalah 100%.



## E. Bagian Sekretariat Panitia Khusus (Pansus)

Sekretariat Pansus memberikan dukungan kegiatan kepada Pansus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya salah satunya dengan dukungan kegiatan persidangan (rapat-rapat pembahasan RUU). Pada tahun 2020, Sekretariat mendapatkan tugas melaksanakan dukungan persidangan dan administrasi kepada Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi III dalam rangka pembahasan RUU Ratifikasi, yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*).

Dalam Pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah *Pidana* antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*) tidak melakukan kunjungan kerja baik ke daerah maupun ke luar negeri.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Bagian Sekretariat Pansus telah memberikan dukungan kegiatan kepada Pansus dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU MD3 dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Adapun kegiatan/rapat-rapat yang telah dilaksanakan oleh Pansus sebanyak 4 rapat sebagaimana terlihat dalam Tabel 19 berikut:

**Tabel 19. Rekapitulasi Rapat Pansus**

No.	Masa Persidangan	BULAN												Jumlah Per Masa Sidang
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS II													
2	MS III													
3	MS IV						3	1						4
4	MS I													
5	MS II													
Jumlah Per Bulan		-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	4

Sumber: Bagian Sekretariat Pansus DPR RI.

Berdasarkan kegiatan rapat-rapat Pansus tersebut, capaian kinerja Bagian Sekretariat Pansus pada Tahun 2020, yaitu tercapai sebanyak 1 dokumen Persidangan Pansus selama 5 masa persidangan yang terdiri dari dukungan penyelenggaraan rapat dan administrasi dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Capaian/output Panitia Khusus dalam tahun 2020, berdasarkan alokasi anggaran yang ada, target pembahasan terhadap 2 RUU, yaitu 1 (satu) RUU dari DPR dan 1 (satu) RUU dari Pemerintah. Dalam realisasi pelaksanaannya, kegiatan pembahasan RUU hanya dari Pemerintah (1 RUU). Faktor yang mempengaruhi minimnya pembahasan oleh Pansus antara lain adalah adanya alat kelengkapan dewan selain pansus yang juga bisa melakukan pembahasan RUU, seperti Badan Legislasi dan komisi, sehingga keputusan dan kebijakan politik dalam penentuan pelaksanaan pembahasan RUU mempunyai beberapa pilihan alat kelengkapan dewan.

**Tabel 20. Rekapitulasi Dokumen Materi Persidangan Pansus**

Kegiatan	Target (dok.)	Realisasi (dok.)	Capaian	
			Kuantitatif	Kualitatif
1) MP II	1	1	100%	100%
2) MP III	1	1	100%	100%
3) MP IV	1	1	100%	100%
4) MP I	1	1	100%	100%
5) MP II	1	1	100%	100%
TOTAL	5	5	100%	100%

Sumber: Bagian Sekretariat Pansus

Disamping mendukung kegiatan rapat-rapat Panitia Khusus, dalam tahun 2020, Bagian Sekretariat Panitia Khusus juga melakukan kegiatan kedinasan lainnya berupa rapat koordinasi dengan unit kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Pansus dalam mendukung kegiatan Dewan.

**Tabel 21. Rekapitulasi Rapat Koordinasi dengan unit terkait**

No.	Masa Persidangan	BULAN												Jumlah Per Masa Sidang
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS II		2											2
2	MS III				2									2
3	MS IV						3							3
4	MS I									3				3
5	MS II										1	2		3
Jumlah Per Bulan		-	2	-	2	-	3	-	-	3	1	2	-	4



Capaian kinerja Sekretariat Pansus DPR RI pada tahun 2020 yaitu sebanyak 5 (lima) dokumen Persidangan Pansus DPR RI selama 5 kali masa persidangan yang terdiri dari dukungan penyelenggaraan rapat dan administrasi. Hal ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Biro Persidangan II, sehingga capaian kinerja Sekretariat Pansus mencapai 100% (serratus persen).

Berikut table capaian kinerja Sekretariat Panitia Khusus DPR RI tahun 2020 dan tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 22 Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Pansus dalam Rapat Koordinasi dengan Unit terkait**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	
			Kuantitatif	Kualitatif
2019	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%
2020	5 Dokumen	5Dokumen	20%	100%

Berdasarkan Tabel diatas, bahwa capaian kinerja dari Sekretariat Pansus, baik pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 secara kuantitatif dan kualitatif tetap tercapai 100% karena jumlah dokumen materi persidangan dan dokumen rapat koordinasi yang dibuat dan disiapkan oleh Sekretariat Pansus maupun unit kerja terkait dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan demikian indicator kinerja dukungan persidangan yang digunakan oleh Pansus sesuai peraturan dengan target 100% sehingga nilai capaian kerjanya adalah 100%.

#### F. Bagian Sekretariat Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)

Sampai dengan akhir tahun 2020, Bagian Sekretariat BAKN telah memberikan dukungan kegiatan kepada BAKN dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU MD3 dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Adapun kegiatan/rapat-rapat yang telah dilaksanakan oleh BAKN sebanyak 48 kali rapat sebagaimana terlihat dalam Tabel 23 berikut:





Tabel 23. Rekapitulasi Output Rapat BAKN

No.	Masa Persidangan	BULAN												Jumlah Per Masa Sidang
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS II	2	8	1										11
2	MS III				2	3								5
3	MS IV						5	4						9
4	MS I								6	7	1			14
5	MS II											9		9
Jumlah Per Bulan		2	8	1	2	3	5	4	6	7	1	9		48

Sumber: Bagian Sekretariat BAKN DPR RI.

Berdasarkan kegiatan rapat-rapat BAKN tersebut, capaian output Bagian Sekretariat BAKN pada Tahun 2020, yaitu tercapai sebanyak 5 (lima) dokumen materi/bahan rapat Masa Persidangan II – IV Tahun 2019 – 2020 dan Masa Persidangan I – II Tahun 2020 – 2021 yang dimanfaatkan oleh DPR RI yang telah dilakukan dalam 5 (lima) Masa Persidangan; dan 5 (lima) dokumen tata usaha Masa Persidangan II – IV Tahun 2019 – 2020 dan Masa Persidangan I – II Tahun 2020 – 2021.

Dokumen skenario dan laporan singkat persidangan Bagian Sekretariat BURT yang dimanfaatkan DPR RI terdiri dari:

**a. Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020 (1 Dokumen).**

Pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020, Sekretariat BAKN telah menyusun Skenario dan Laporan Singkat Rapat-rapat, sebagaimana berikut:

1. Skenario dan Laporan Singkat Rapat Pimpinan BAKN sebanyak 4 berkas;
2. Skenario dan Laporan Rapat Intern BAKN sebanyak 2 berkas;
3. Skenario dan Laporan Singkat RDPU sebanyak 1 berkas;
4. Skenario dan Laporan Singkat RDP sebanyak 3 berkas;
5. Skenario dan Laporan Singkat Rapat Konsultasi 1 berkas.
6. Skenario dan Laporan Singkat Rapat BAKN 1 berkas.



**b. Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 (1 Dokumen).**

Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020, Sekretariat BAKN telah menyusun Skenario dan Laporan Singkat Rapat-rapat, sebagaimana berikut:

1. Skenario dan Laporan Singkat Rapat Pimpinan BAKN sebanyak 3 berkas;
2. Skenario dan Laporan Rapat Intern BAKN sebanyak 2 berkas.

**c. Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 (1 Dokumen).**

Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020, Sekretariat BAKN telah menyusun Skenario dan Laporan Singkat Rapat-rapat, sebagaimana berikut:

1. Skenario dan Laporan Singkat Rapat Pimpinan BAKN sebanyak 3 berkas;
2. Skenario dan Laporan Rapat Intern BAKN sebanyak 1 berkas;
3. Skenario dan Laporan Singkat RDP sebanyak 2 berkas;
4. Skenario dan Laporan Singkat RDPU sebanyak 5 berkas.

**d. Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 (1 Dokumen).**

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2020, Sekretariat BAKN telah menyusun Skenario dan Laporan Singkat Rapat-rapat, sebagaimana berikut:

1. Skenario dan Laporan Singkat Rapat Pimpinan BAKN sebanyak 3 berkas;
2. Skenario dan Laporan Rapat Intern BAKN sebanyak 2 berkas;
3. Skenario dan Laporan Singkat RDP sebanyak 8 berkas;
4. Skenario dan Laporan Singkat Rapat Konsultasi sebanyak 1 berkas.

**e. Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021 (1 Dokumen).**

Pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021, Sekretariat BAKN telah menyusun Skenario dan Laporan Singkat Rapat-rapat, sebagaimana berikut:

1. Skenario dan Laporan Singkat Rapat Pimpinan BAKN sebanyak 5 berkas;
2. Skenario dan Laporan Rapat Intern BAKN sebanyak 1 berkas;
3. Skenario dan Laporan Singkat RDP sebanyak 7 berkas;
4. Skenario dan Laporan Singkat Rapat Konsultasi sebanyak 1 berkas.



Berdasarkan kegiatan rapat-rapat BAKN, capaian kinerja Sekretariat BAKN pada tahun 2020 yaitu tercapai 5 dokumen persidangan BAKN selama 5 kali masa persidangan yang terdiri dari dukungan penyelenggaraan rapat dan administrasi dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sehingga capaian kinerja tercapai 100% baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan rincian dokumen sebagaimana Tabel 24 sebagai berikut:

**Tabel 24. Rekapitulasi Dokumen Materi Persidangan BAKN**

Kegiatan	Jumlah Rapat	Target (dok.)	Realisasi (dok.)	Capaian	
				Kuantitatif	Kualitatif
1) MP II	2	1	1	100%	100%
2) MP III	5	1	1	100%	100%
3) MP IV	9	1	1	100%	100%
4) MP I	14	1	1	100%	100%
5) MP II	9	1	1	100%	100%
TOTAL	48	5	5	100%	100%

Sumber: Bagian Sekretariat BAKN DPR RI

Perbandingan capaian/output Bagian Sekretariat BAKN DPR RI tahun 2020 dengan tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel 25 berikut:

**Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja Bagian Sekretariat BAKN**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	
			Kuantitatif	Kualitatif
2019	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%
2020	5 Dokumen	5 Dokumen	20%	100%

Sumber: Bagian Sekretariat BAKN DPR RI



Berdasarkan Tabel 25 tersebut terlihat bahwa capaian kinerja dari Bagian Sekretariat BAKN, baik pada Tahun 2019 maupun sampai dengan Tahun 2020 secara kuantitatif dan kualitatif tetap tercapai 100% karena prosentase dokumen materi/bahan rapat Masa Persidangan II – IV Tahun 2019 – 2020 dan Masa Persidangan I – II Tahun 2020 – 2021 yang dimanfaatkan oleh DPR RI yang dibuat dan disiapkan oleh Bagian Sekretariat BAKN telah seluruhnya digunakan oleh BAKN DPR RI. Dengan demikian, indikator kinerja “prosentase dokumen materi/bahan rapat Masa Persidangan II – IV Tahun 2019 – 2020 dan Masa Persidangan I – II Tahun 2020 – 2021 yang dimanfaatkan oleh DPR RI” dengan target 5 (lima) dokumen telah terealisasi 100% sehingga nilai capaian kerjanya adalah 100%.



## BAB V PENUTUP

Selama tahun 2020 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Biro Persidangan II telah melaksanakan 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yaitu Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan dengan perjanjian kinerja dengan 13 (tiga belas) Indikator kinerja. Adapun capaian kinerja Biro Persidangan II sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

**Tabel 26. Capaian Kinerja Biro Persidangan II**

BIRO PERSIDANGAN II			
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan, Mahkamah dan Panitia Khusus	Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI	100%	<b>100%</b>
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3,30	<b>3,30</b>
	Persentase penyerapan anggaran Biro Persidangan II	90%	<b>94,43%</b>

Biro Persidangan II selalu berupaya melaksanakan kinerja secara optimal dan terus melakukan upaya perbaikan. Dengan bantuan sumber daya manusia yang dimiliki dan komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Biro Persidangan II untuk bekerja sebaik mungkin, pada tahun 2020 Biro Persidangan II telah mampu menyelesaikan seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja tahun 2020. Biro Persidangan II mampu meningkatkan kualitas dukungan Persidangan Badan, Mahkamah dan Panitia Khusus. Hal ini tercermin pada tercapainya seluruh indikator kinerja. Tahun 2020 ini, Biro Persidangan II mampu mencapai target Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI, mampu mencapai target Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan, dan mampu mencapai target Persentase penyerapan anggaran Biro Persidangan II.

Dengan rata-rata capaian kinerja berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 100% maka kinerja Biro Persidangan II dapat dikatakan memiliki kategori **Sangat Baik**. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini juga telah diimbangi dengan capaian penyerapan anggaran yang optimal dalam mendukung pencapaian kinerja.



Demikian Laporan Kinerja Biro Persidangan II mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Persidangan II berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2020. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dari Biro Persidangan II sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga pada tahun mendatang Biro Persidangan II diharapkan dapat terus meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan, Mahkamah dan Panitia Khusus secara optimal dan capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, Januari 2021  
Plt. Kepala Biro Persidangan II,

ttd

Dra. Nurul Faiziah  
NIP. 196502201991032002



## **LAMPIRAN :**



## BEBERAPA FOTO KEGIATAN DI JAJARAN BIRO PERSIDANGAN II













**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020**  
**BIRO PERSIDANGAN II**

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA







**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020**  
**BIRO PERSIDANGAN II**

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



